

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN TERUMBU
KARANG DI KECAMATAN TOGEAN KABUPATEN
TOJO UNA-UNA**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat ujian untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sintuwu Maroso**

Oleh

**IMELDA AMBODAY
NPM.91911405171067**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
2023**

ABSTRAK

IMELDA AMBODAY. 2023. *“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Terumbu Karang Di Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-Una”*. Dibimbing oleh Moh. Rusli Syaib dan Fitria Y. Alim.

Kata Kunci: *Implementasi kebijakan, pengelolaan terumbu karang*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan terumbu karang di Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-una dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Dinas, Camat Togean, Pengelola Pariwisata dan masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang permasalahan yang teliti. Untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau yang menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan, sudah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una dan pemerintah Kecamatan Togean dan tetap konsisten melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya upaya menjaga kelesatarian terumbu karang sebagai modal pariwisata di Kecamatan Togean. Rehabilitasi, sudah dilaksanakan dengan mencoba metode transplantasi terumbu karang. Perlindungan, sudah dilaksanakan dengan menjalin koordinasi yang baik dengan aparaturnya Kecamatan ataupun dengan lembaga lain. Monitoring dan evaluasi sudah terlaksana dengan baik, hal ini didorong oleh faktor koordinasi dan kerja sama antar lembaga termasuk koordinasi dengan mitra kerjanya seperti Badan Lingkungan Hidup dan LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan terumbu karang di Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-Una diantaranya kurangnya tenaga pengawas serta terbatasnya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan di lapangan.



ABSTRACT

Imelda Amboday. 2023. "Implementation of Coral Reef Management Policy in Togean District, Tojo Una-Una Regency". Supervised by Moh. Rusli Syuaib and Fitria Y. Alim.

Keywords: *Policy implementation, coral reef management*

This research aims to find out the implementation of coral reef management policies in Togean SubDistrict, Tojo Una-una Regency and the factors that influence it. The informants in this research consisted of the Head of Service, the Togean Subdistrict Head, the Tourism Manager and the community. This research uses a type of descriptive research that provides a detailed and clear picture of the problem in detail. To find out the value of an independent variable, either one or more variables without making comparisons or connecting one variable with another variable. The results of the research show that prevention has been implemented well by the Tojo Una-Una Regency Fisheries Service and the Togean SubDistrict government and continues to consistently provide outreach to the community regarding the importance of preserving coral reefs as tourism capital in the Togean SubDistrict. Rehabilitation has been carried out by trying the coral reef transplant method. Protection has been implemented by completing good coordination with sub-district officials or with other institutions. Monitoring and evaluation have been carried out well, this is driven by coordination and cooperation between institutions, including coordination with work partners such as the Environmental Agency and NGOs working in the environmental sector. Factors that influence coral reef management in Togean SubDistrict, Tojo Una-Una Regency include a lack of supervisory staff and limited facilities and infrastructure to support activities in the field.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| LEMBAR PERNYATAAN | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 10 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 11 |
| 1. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| 2. Manfaat Penelitian..... | 11 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN ALUR PIKIR | |
| A. Kajian | |
| Pustaka..... | 12 |
| 1. Pengertian Implementasi..... | 12 |
| 2. Pengertian Kebijakan Publik..... | 14 |
| 3. Konsep Pengelolaan..... | 18 |

| | |
|--|----|
| 4. Pengertian Terumbu Karang..... | 23 |
| B. Landasan Teoritis dan Kepustakaan yang Relevan..... | 28 |
| C. Alur Pikir..... | 30 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Tipe dan Dasar Penelitian | 31 |
| 1. Tipe Penelitian..... | 31 |
| 2. Dasar Penelitian..... | 31 |
| B. Definisi Konsep..... | 32 |
| C. Jenis Data..... | 33 |
| D. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data | 33 |
| E. Instrumen Penelitian | 35 |
| F. Analisis Data..... | 35 |
| G. Lokasi Penelitian | 36 |
| H. Waktu dan Jadwal Penelitian | 36 |

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Deskripsi Lokasi Penelitian..... | 37 |
| 1. Gambaran Umum Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-Una..... | 37 |
| 2. Kondisi Sosial dan Budaya..... | 38 |
| 3. Kondisi Ekologis Keanekaragaman Hayati..... | 38 |
| B. Hasil dan Pembahasan Penelitian | 40 |
| 1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Terumbu Karang di | |

| | |
|---|----|
| Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-Una..... | 40 |
| 2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan | |
| Pengelolaan Terumbu Karang di Kecamatan Togean Kabupaten | |
| Tojo Una-Una..... | 54 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 59 |
| B. Saran..... | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Syahrul Machmud dalam buku hukum lingkungan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggungjawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pengelolaan lingkungan hidup, menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa lingkungan atau lingkungan hidup adalah segala sesuatu benda, keadaan, situasi yang ada di sekeliling makhluk hidup dan berpengaruh terhadap kehidupan (sifat, pertumbuhan, persebaran) makhluk hidup yang bersangkutan. Lingkungan hidup baik faktor biotik maupun abiotik

berpengaruh dan dipengaruhi manusia. Segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia karena lingkungan memiliki daya dukung. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dan keseimbangan antar keduanya.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta, makhluk hidup lainnya. Lingkungan memiliki cakupan yang sangat luas. Tidak hanya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau yang benda-benda bersifat fisik. Lingkungan, mencakup didalamnya berbagai hal dari yang bersifat biotik, organik, anorganik hingga sosial.

Sedangkan menurut Soedjono “lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam. Pengertian ini menjelaskan bahwa manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani menurut soedjono , didalam lingkungan ada dua unsur. unsur tersebut adalah lingkungan hidup jasmani dan lingkungan hidup fisik yang meliputi semua faktor serta unsur fisik jasmaniah. secara sederhana pengertian lingkungan adalah semua hal mengenai kehidupan. seperti manusia, tumbuhan dan hewan.

Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya

pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegak hukum. Kemudian UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) juga menjelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dalam Undang-undang ini tercantum jelas bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya. Undang–Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil diharapkan dijadikan sebagai dasar dalam pengelolaan wilayah pesisir dengan harapan bahwa keragaman sumber daya alam yang tinggi dan sangat penting yang terkandung didalamnya dapat dikembangkan untuk kepentingan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, dan penyangga kedaulatan Negara agar dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional.

Peraturan Daerah Tojo Una-una Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang dan masih banyak lagi undang-undang yang menjadi bahan pertimbangan dikeluarkannya peraturan daerah tersebut. Terumbu karang yang terletak di Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-una. merupakan tempat wisata laut yang sekaligus sebagai tempat para nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan memanfaatkan sumber daya laut yang dimilikinya.

Kekayaan sumber daya ikan strategis seperti udang atau lobster, tuna atau cakalang, cumi-cumi, ikan demersal dan karang serta bola-bola (teripang) yang melimpah, telah banyak menarik banyak para nelayan penangkap ikan dari luar kawasan maupun dalam kawasan untuk beroperasi di wilayah ini. Namun demikian, kenyataan dilapangan saat ini, kondisi sumber daya ikan di Kecamatan Togean Kabupateen Tojo Una-una cenderung menunjukan gejala penangkapan yang berlebihan yang dapat merusak kelestarian terumbu karang yang ada Di Kecamatan Togeaan Kabupaten Tojo Una-una.

Sumber daya dan ekosistemnya merupakan sumber daya potensial yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara berkesinambungan untuk kemakmuran dan dapat dinikmati dari generasi ke generasi secara berkelanjutan melalui manfaat barang maupun jasa apabila dikelola secara baik dengan memperhatikan karakteristik dan daya dukung lingkungannya. Pemanfaatan sumber daya laut baik yang bersifat terbahruai maupun tidak terbahruai semakin meningkat seiring dengan meningkatnya populasi manusia, sehingga tekanan terhadap sumber daya alam laut dan ekosistemnya semakin meningkat pula.

Oleh karena itu pemanfaatan sumber daya alam laut harus dilakukan secara bijaksana, terencana, dan terkendali. Salah satu bentuk untuk melindungi sumber daya alam ini adalah melakukan konservasi dengan cara menyisihkan lokasi yang memiliki potensi keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, gejala alam dan keunikan, serta ekosistemnya menjadi kawasan konservasi laut. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak terlepas dari pengelolaan terumbu karang yang lestari. Hal ini disebabkan karena terumbu karang merupakan bagian integral dari ekosistem pantai dan sebagai komponen dasar tempat berkembang biaknya biota-biota kecil lainnya (Mujyianto: 2013).

Terumbu karang adalah bangunan ribuan karang yang menjadi tempat hidup berbagai ikan dan mahluk laut lainnya. Bayangkanlah terumbu karang sebagai sebuah ibu kota yang sangat sibuk, bangunanya terdiri dari karang-karang, dengan ikan-ikan dan mahluk laut sebagai penghuninnya. Karang yang hidup dilaut, tampak terlihat seperti batuan atau tanaman, tetapi mereka sebenarnya adalah sekumpulan hewan-hewan kecil yang dinamakan polip. Ada dua macam karang, yaitu karang batu (*hard corals*) dan karang lunak (*soft corals*). Karang batu merupakan karang pembentuk terumbu karena tubuhnya yang keras seperti batu. Kerangkanya terbuat dari kalsium karbonat atau zat kapur.karang batu bekerja sama dengan alga yang disebut *zooxanthellae*. Karang batu hanya hidup diperairan dangkal dimana sinar matahari masih di dapatkan. Karang lunak bentuknya seperti tanaman dan tidak bekerja sama dengan alga. Karang lunak dapat hidup baik diperairan dangkal maupun perairan dalam yang

gelap. Kekayaan terumbu karang Indonesia justru terancam rusak akibat berbagai hal, baik karena faktor alam seperti perubahan iklim maupun akibat ulah manusia sendiri salah satunya adalah penyebab kerusakan terumbu karang adalah penangkapan ikan yang berlebihan sedangkan masalah dalam pengelolaan terumbu karang yaitu infrastruktur yang tidak memadai, meningkatnya oknum-oknum yang merusak, *overfishing*. (Penangkapan sumber daya berlebihan), pemutihan karang (*coral bleaching*) akibat pemanasan global dan sedimentasi pencemaran dari darat.

Kerusakan terumbu karang juga bernilai kerugian materiil yang sangat besar yang terkait nilai-nilai lain termasuk nilai-nilai ekologisnya. Hal inilah yang membuat perikanan terumbu karang merupakan salah satu sumber penghidupan utama bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Kerusakan terjadi di beberapa Pulau salah satunya yaitu Pulau Togean yang juga terkenal akan tempat wisata dengan keunggulan terumbu karang dan sering diadakan acara-acara besar seperti lomba mancing dan lomba lainnya.

Di Pulau Togean ini masih sering terjadi penangkapan ikan yang tidak wajar oleh sekelompok orang yang dapat merusak terumbu karang misalnya, menangkap ikan dengan menggunakan BOM dan BIUS inilah kasus yang sangat memprihatinkan dan menjadi keluhan bukan hanya untuk masyarakat disekitar pulau tersebut tapi juga bagi para penegak hukum dan para pengelola terumbu karang serta nelayan yang mencari nafkah dengan menangkap ikan adapun yang menangkap ikan dengan cara menggunakan pukat harimau. Dengan berkurangnya

terumbu karang menyebabkan pendapatan ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan Pulau Togeon semakin menurun setiap tahunnya. Pemerintah banyak mengalami kendala dalam menuntaskan masalah kerusakan terumbu karang yang telah dipandang sebagai aktifitas mafsia yang seolah tak pernah tersentuh hukum meskipun telah berkali-kali dilakukan upaya pemberantasan dan pengelolaan khususnya di Pulau Togeon.

Berbagai penelitian dan pengamatan terhadap pemanfaatan sumberdaya terumbu karang menunjukkan bahwa penyebab utama permasalahan pengelolaan terumbu karang yaitu akibat kegiatan manusia dan akibat alam. Kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya kerusakan terumbu karang antara lain :

1. Penambangan dan Pengambilan karang
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan metode yang merusak
3. Penangkapan ikan yang berlebihan
4. Pencemaran perairan
5. Kegiatan pembangunan di wilayah pesisir
6. Dan kegiatan pembangunan di wilayah hulu.

Sedangkan kerusakan terumbu karang yang diakibatkan oleh alam yaitu pemanasan global, bencana alam, seperti angin kencang, gempa tektonik , banjir, dan fenomena alam lainnya. Sepuluh faktor yang jadi menjadi akar permasalahan, yaitu :

1. Inkonsistensi dalam implementasi kebijakan yang diambil
2. Metode pengelolaan yang kurang memadai

3. Instrument hukum dan penegakan peraturan perundangan yang belum memadai
4. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang arti penting dan nilai strategis terumbu karang dari berbagai kalangan
5. Kemiskinan
6. Keserakahan
7. Kapasitas dan kapabilitas pengelola yang kurang memadai
8. Permintaan pasar/tingkat laku konsumen
9. Faktor budaya, adat istiadat, kebiasaan serta
10. Status wilayah terumbu karang yang terbuka untuk umum.

Pengelolaan ekosistem terumbu karang pada hakekatnya adalah suatu proses pengontrolan tindakan manusia, agar pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara bijaksana dengan mengindahkan kaidah kelestarian lingkungan. Maka pengelolaan sumber daya terumbu karang tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, tetapi harus dilakukan secara terpadu oleh beberapa instansi terkait.

Namun berdasarkan pengamatan awal yang peneliti lakukan di Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-una masih ada ditemukan keluhan keluhan baik dari masyarakat dan para nelayan, pengelolah wisata, maupu Pemerintah daerah itu sendiri terkait keluhan keluhan yang dimaksud yaitu banyaknya terumbu karang yang rusak, kepedulian masyarakat yang masih sangat kurang terhadap pelestarian ekosistem bawah laut, dan marakannya

pengeboman ikan yang banyak meresahkan warga dan pelaku jasa wisata di Togean, Kerusakan terumbu karang yang disebabkan oleh berbagai kegiatan manusia dapat secara langsung maupun tidak langsung, contohnya yang paling banyak antara lain adalah kegiatan perikanan, usaha penangkapan ikan hias, ikan konsumsi, pengambilan kerang-kerang, dan udang dengan menggunakan bahan peledak, bahan kimia beracun dapat merusak dan memperparah kerusakan terumbu karang yang ada di wisata Pulau Togean, Semakin bertambahnya nilai ekonomis maupun kebutuhan masyarakat akan sumber daya alam yang ada di terumbu karang seperti ikan, udang, lobster dan lainnya maka aktivitas yang mendorong masyarakat untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam tersebut semakin besar pula, dengan demikian tekanan ekologis terhadap ekosistem terumbu karang juga akan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peranan ekosistem terumbu karang sangat strategis dalam mendukung ketersediaan sumberdaya perikanan yang merupakan faktor utama yang mendukung eksistensi masyarakat pesisir.

Menurut masyarakat setempat mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-una yang dominan adalah nelayan, sebagian kecil menjadi pembudidaya dan pedagang. Batas geografis membuat pilihan-pilihan mata pencaharian menjadi sangat terbatas kalau tidak dikatakan kurang. Sehingga sebagian besar dari masyarakat tersebut menggantungkan hidup dari sumberdaya laut yang tersedia. Tingginya permintaan pasar menjadi faktor utama semakin tingginya tingkat persaingan dalam mengeksploitasi sumberdaya.

Ekosistem terumbu karang mengalami kerusakan yang cukup parah. Hal ini terjadi karena hampir sebagian besar nelayan menggunakan cara-cara pintas yaitu dengan memanfaatkan alat dan bahan yang bersifat destruktif (sianida dan potasium), karena dengan metode tersebut dapat memperoleh hasil yang banyak dalam waktu singkat. Meningkatnya tekanan ini tentunya akan dapat mengancam keberadaan dan kelangsungan ekosistem terumbu karang dan biota yang hidup didalamnya. Untuk mengurangi laju degradasi yang terjadi pada terumbu karang akibat eksploitasi manusia masyarakat perlu mengelola dan menjaga terumbu karang agar manfaat serta fungsi terumbu karang dapat terjaga dengan baik. Pengumpulan data juga penting untuk mengetahui jumlah tutupan dan kematian karang yang telah terjadi. Besarnya kerusakan terumbu karang dapat mengancam keberlanjutan ketersediaan pangan dan akan memaksa masyarakat di daerah pesisir berpindah karena kehilangan sumber makanan dan sumber pendapatan.

Maka dari keluhan-keluhan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian, dengan judul : **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Terumbu Karang Di Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-Una”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan terumbu karang di Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-una?

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan terumbu karang di Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-una?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan terumbu karang di Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-una.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kerusakan terumbu karang yang ada di Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-una.

2. Manfaat Penelitian

Dari pelaksanaan penelitian ini memberikan manfaat yaitu:

- a. Dari segi teoritis hasil penelitian ini akan menambah referensi dan bisa menambah wawasan bagi kalangan akademik.
- b. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi kontribusi bagi pemerintah kecamatan togean khususnya dalam pengelolaan terumbu karang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abiding ,S.Z. 2002. *Kebijakan Publik* . Jakarta: Yayasan Pancur Siwan.
- Arialuet. 2010. *Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang*. Jakarta: Gramedia
- Afifuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Bandung: alvabeta
- Atmosudirjo, Prajudi. 1982. *Administrasi Dan Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Amin. 2009. *Manfaat Terumbu karang ; Aset yang Terancam* (Akar Masalah dan Alternatif Solusi Penyelamatannya), Region 1(2):1-12.
- Budiharto, Widodo. 2014 *Teori dan Implementasi*. Edisi Revisi, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Carl Van Horn dan Donal Van Meter, 1975. *Model-model Dalam Kebijakan Implementasi*, Yogyakarta
- Defi Maya, Oktasari Defi. 2015. *Implementasi Kepmen Pan No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Publik*. Mulawarman. Vol 3 No 2, 2015.
- Edward, George. C.1980. *Implementing Public Policy*. Washington D.C: Congressional Quarterly Inc.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Public: Proses, Analisis dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Harsoyo. 1977. *Pengertian Pengelolaan*. <http://id.shooving.com/writing-and-speaking-presenting/2108155-pengertian-pengelolaan/>. Diakses pada tanggal 1 mei 2023
- Hasibuan, Melayu S. P. 2019. *Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah*. Jakarta: Bumi Akasara

- Johan, O. Hadie, W., Saputra, A., Haryadi, J., dan Listyanto, N. 2007. *Budi Daya Karang Hias Mendukung Perdagangan Karang Hias Yang Berkesinambungan*. Jurnal Riset Akuakultur 2(3):419-428.
- Kholish, M. N. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Kerusakan Terumbu Karang di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Studi di Gili Air)*. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat.
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Bandung*: Alfabeta.
- Milles , B. Matthew, dan Huberman, A. Michael, *Qualitative Data Analysis*, Terjemahan, UI Press, Jakarta, 2007.
- Nugroho, Riant. 2015. *Kebijakan Public di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Romimoharto, K., & Juwana, S. 2001. *Biologi Laut : Ilmu Pengetahuan Tentang Biota Laut*, Jakarta: Djambatan.
- Sunarto. 2006, *Keanekaragaman Hayati dan Degradasi Ekosistem Terumbu karang*. Karya Ilmiah, Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan, Universitas Padjajaran, Jatinanggor.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi: Konsep, Strategi & Kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: teori dan Proses*, Jakarta: Buku Kita
- Yusnita, A. 2014. *Kajian Potensi Dampak Wisata Bahari Terhadap Terumbu Karang di Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu*. Tesis-S2 Sekolah Pascasarjana, Institute Pertanian Bogor, Bogor.
- Pasanea, Y. E. 2013. *Kondisi Terumbu Karang dan Penyusunan Konsep Strategis Pengawasan Ekonomi Terumbu Karang Di Pulau Mensinam, Kabupaten Manokwari*. Naskah Skripsi-S1, Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan, Universitas Hasanuddin, Makassar.

B. Dokumen

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 ayat 3 pasal 69 mengenai Larangan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang.